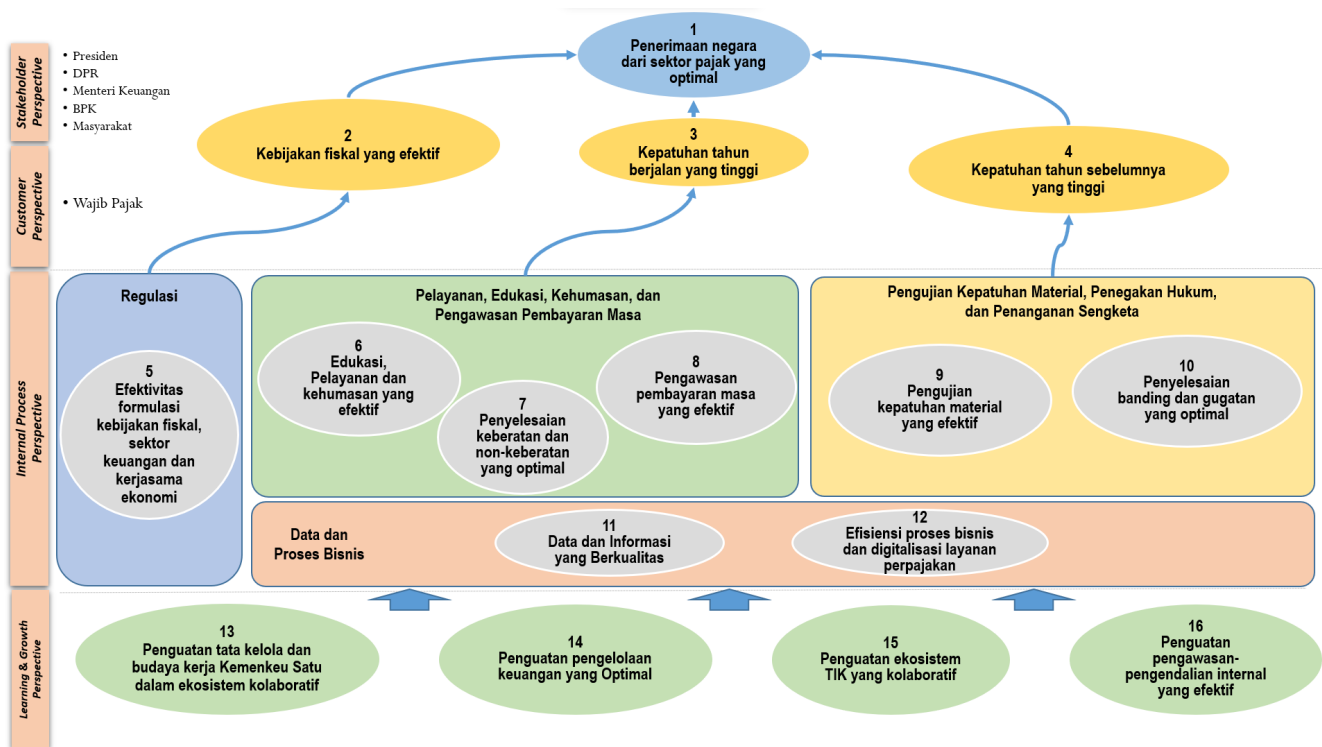




PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-3/MK/2023 DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2023

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2.	Kebijakan fiskal yang efektif	2a-CP	Indeks efektivitas insentif fiskal (kebijakan penerimaan negara)	100 (86)
		2b-CP	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	70%
3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	3a-N	Tingkat kepatuhan tahun berjalan Wajib Pajak	100%
		3a1-N	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi	100%
		3a2-N	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
4.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	4a-N	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
5.	Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan dan kerjasama ekonomi	5a-CP	Tingkat implementasi efektivitas Kemenkeu Kewilayahan (Setber, RCE, dan sinergi UMKM)	100%
		5b-N	Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100
		5c-N	Indeks efektivitas peraturan	7,50 (skala 10)
6.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	6a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%
		6b-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
		6c-N	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70%
7.	Penyelesaian keberatan dan non-keberatan yang optimal	7a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	85,5%
		7a1-CP	Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	78%
		7a2-CP	Persentase penyelesaian non-keberatan tepat waktu	93%
8.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	8a-N	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
9.	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif	9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100%
		9a1-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		9a2-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	80%
		9a3-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
10.	Penyelesaian banding dan gugatan yang optimal	10a-N	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	45%
11.	Data dan informasi yang berkualitas	11a-N	Persentase data yang valid	80%
12.	Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan	12a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	85%
		12b-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan (3C)	100%
13.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	13a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well-being	100%
		13b-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%
		13c-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	95%
		13c1-CP	Tingkat implementasi learning organization	90%
		13c2-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%
		13d-CP	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%
14.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	14a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		14a1-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	90,4
		14a2-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)
		14a3-N	Indeks efisiensi belanja birokrasi	85 (skala 100)
15.	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif	15a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%
		15a1-CP	Tingkat downtime sistem TIK	0,10%
		15a2-CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	92%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		15a3-CP Persentase penyelesaian data analytics	92%
16.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	16a-CP Indeks Integritas Organisasi	95,95
		16a1-CP Indeks Integritas	87,84
		16a2-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100
		16a3-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK	100%



Program / Kegiatan Tahun 2023		Anggaran
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	2.117.067.882.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	235.632.812.000
2. Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	Rp	13.947.600.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	1.664.310.585.000
4. Perumusan Kebijakan Administratif	Rp	54.036.868.000
5. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	149.140.017.000
B. Program Kebijakan Fiskal	Rp	191.440.000
1. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp	191.440.000
C. Program Dukungan Manajemen	Rp	4.626.294.801.000
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	1.819.180.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	2.345.349.126.000
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	1.408.438.010.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	3.088.223.000
5. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp	867.408.851.000
6. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	191.411.000
Total	Rp	6.743.554.123.000

Menteri Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Jakarta, 27 Januari 2023
Direktur Jenderal Pajak



Ditandatangani Secara Elektronik
Suryo Utomo



**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
2	Kebijakan fiskal yang efektif							
2a-CP	Indeks efektivitas insentif fiskal (kebijakan penerimaan negara)	-	-	-	-	-	100 (86)	100 (86)
2b-CP	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	-	70%	70%	-	70%	70%	70%
3	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
3a-N	Tingkat kepatuhan tahun berjalan Wajib Pajak	35%	57,5%	57,5%	80%	80%	100%	100%
3a1-N	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi	50%	70%	70%	90%	90%	100%	100%
3a2-N	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
4	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
4a-N	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	20%	40%	40%	65%	65%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5	Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan dan kerjasama ekonomi							
5a-CP	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)	-	-	-	-	-	100%	100%
5b-N	Indeks penyelesaian kebijakan/ regulasi prioritas	-	60	60	-	60	100	100
5c-N	Indeks efektivitas peraturan	-	-	-	-	-	7,50 (skala 10)	7,50 (skala 10)
6	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							
6a-CP	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%
6b-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	-	100	100	-	100	100	100
6c-N	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	40%	40%	-	70%	70%	70%
7	Penyelesaian keberatan dan non-keberatan yang optimal							
7a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	85,5%	85,5%	85,5%	85,5%	85,5%	85,5%	85,5%
7a1-CP	Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
7a2-CP	Persentase penyelesaian non-keberatan tepat waktu	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
8	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
8a-N	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif							
9a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	57,41%	71,06%	71,06%	78,47%	78,47%	100%	100%
9a1-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9a2-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	40%	55%	55%	55%	55%	80%	80%
9a3-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
10	Penyelesaian banding dan gugatan yang optimal							
10a-N	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/ gugatan di pengadilan pajak	-	45%	45%	-	45%	45%	45%
11	Data dan informasi yang berkualitas							
11a-N	Persentase data yang valid	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
12	Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan							
12a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	15%	35%	35%	60%	60%	85%	85%
12b-CP	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan (3C)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
13	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
13a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well-being	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13b-CP	Persentase penyelesaian program IS RBTK	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
13c-CP	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	-	20%	20%	-	20%	95%	95%
13c1-CP	Tingkat implementasi learning organization	-	-	-	-	-	90%	90%
13c2-CP	Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	-	20%	20%	-	20%	100%	100%
13d-CP	Persentase penyelesaian revisit kelembagaan Kemenkeu	-	-	-	-	-	100%	100%
14	Penguatan pengelolaan keuangan yang optima I							
14a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
14a1-CP	Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	-	68	68	-	68	90,4	90,4
14a2-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)	100 (95,5%)
14a3-N	Indeks efisiensi belanja birokrasi	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)	-	85 (skala 100)	85 (skala 100)	85 (skala 100)
15	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif							
15a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15a1-CP	Tingkat downtime sistem TIK	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
15a2-CP	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	10%	30%	30%	60%	60%	92%	92%
15a3-CP	Tingkat penyelesaian data analytics	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
16	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
16a-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	95,95	95,95
16a1-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	87,84	87,84
16a2-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100	100
16a3-CP	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK	-	-	-	-	-	100%	100%

Jakarta, 27 Januari 2023
Direktur Jenderal Pajak,



Ditandatangani Secara Elektronik
Suryo Utomo



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Suryo Utomo, S.E., Ak., M.B.T.	NAMA	Sri Mulyani Indrawati	
NIP	196903261993101001	NIP	-	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	PANGKAT/ GOL RUANG	-	
JABATAN	Direktur Jenderal Pajak	JABATAN	Menteri Keuangan	
UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Pajak	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
2.	Kebijakan fiskal yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas insentif fiskal (kebijakan penerimaan negara)	100 (86)	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	70%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kepatuhan tahun berjalan Wajib Pajak	100%	Penerima Layanan
4.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan



5.	Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan dan kerjasama ekonomi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)	100%	Proses Bisnis
		Indeks penyelesaian kebijakan/ regulasi prioritas	100	Proses Bisnis
		Indeks efektivitas peraturan	7,50 (skala 10)	Proses Bisnis
6.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%	Proses Bisnis
		Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	Proses Bisnis
		Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70%	Proses Bisnis
7.	Penyelesaian keberatan dan non-keberatan yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	85,5%	Proses Bisnis
8.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	Proses Bisnis
9.	Pengujian Kepatuhan Material yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	100%	Proses Bisnis
10.	Penyelesaian banding dan gugatan yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/ gugatan di pengadilan pajak	45%	Proses Bisnis
11.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase data yang valid	80%	Proses Bisnis
12.	Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	85%	Proses Bisnis



	(Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan (3C)	100%	Proses Bisnis
13.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well-being	100%	Penguatan Internal
		Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%	Penguatan Internal
		Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	95%	Penguatan Internal
		Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%	Penguatan Internal
14.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	Penguatan Internal
15.	Penguatan ekosistem TIK yang kolaboratif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	Penguatan Internal
16.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks Integritas Organisasi	95,95	Penguatan Internal

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan</p>



PERILAKU KERJA		
		perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

27 Januari 2023



Pegawai yang Dinilai,



Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Suryo Utomo

196903261993101001

Ditandatangani secara elektronik

Sri Mulyani Indrawati

-



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 4006 pegawai
2. Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
2	Indeks efektivitas insentif fiskal (kebijakan penerimaan negara)	-	-	-	-	-	100 (86)	100 (86)
3	Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	-	70%	70%	-	70%	70%	70%
4	Tingkat kepatuhan tahun berjalan Wajib Pajak	35%	57,5%	57,5%	80%	80%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	20%	40%	40%	65%	65%	100%	100%
6	Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)	-	-	-	-	-	100%	100%



No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Indeks penyelesaian kebijakan/ regulasi prioritas	-	60	60	-	60	100	100
8	Indeks efektivitas peraturan	-	-	-	-	-	7,50 (skala 10)	7,50 (skala 10)
9	Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	3%	7%	7%	11%	11%	100%	100%
10	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	-	100	100	-	100	100	100
11	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	40%	40%	-	40%	70%	70%
12	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	85,5%	85,5%	85,5%	85,5%	85,5%	85,5%	85,5%
13	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
14	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	57,41%	71,06%	71,06%	78,47%	78,47%	100%	100%
15	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/ gugatan di pengadilan pajak	-	45%	45%	-	45%	45%	45%
16	Persentase data yang valid	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%



No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
17	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	15%	35%	35%	60%	60%	85%	85%
18	Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan (3C)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
19	Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well-being	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Persentase penyelesaian program IS RBTK	23%	46%	46%	69%	69%	92%	92%
21	Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	-	20%	20%	-	20%	95%	95%
22	Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	-	-	-	-	-	100%	100%
23	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
24	Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	95,95	95,95

KONSEKUENSI	
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



27 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik

Suryo Utomo

Sri Mulyani Indrawati

196903261993101001

-

